

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PROGRAM PENGEMBANGAN
KECAMATAN
(PNPM-PPK)
DI KECAMATAN MUARA BADAK
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

ABIDIN

**Mahasiswa Program Pascasarjana
Magister Ilmu Administrasi Negara
Universitas Mulawarman**

ABSTRACT

The problems stated in this research are how the implementation of *PNPM-PPK* is executed, how far the contribution of local government is, and participation of society in the implementation of *PNPM-PPK* in Muara Badak District of Kutai kartanegra Regency.

The result of this research reveals that on the basis of fact, *PNPM PPK* program has been implemented appropriately on the basis of its flow and arrangement. It is indicated by 100% level of realization if it is viewed from budget realization and physical project which have been accomplished on the basis of the 50% taken from *APBD*, 50 % taken from *BLM*, and 30% of the total budget as the extra fund which is taken from participation of the society.

On the basis of the condition above, it can be concluded that *PNPM-PPK* has been implemented maximally by the people who are doing the program. The program has been implemented accurately, effectively, and efficiently as it is indicated by its benefit to the poor family in the villages of program target.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembukaan UUD 1945 alinea ke IV, menyatakan bahwa tujuan berdirinya Indonesia adalah :

1. Untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Inonesia dan untuk menajukan kesejahteraan umum.

2. Meneerdaskan kehidupan bangsa
3. Dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Undang Undang Nomor : 17 Tahun 2007 tentang Rencana pembangunan jangka Panjang Nasional tahun 2005 2025. Tujuan undang undang tersebut adalah untuk :

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan nasional.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antarwaktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
5. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2004 2009 yang mencantumkan tiga agenda pembangunan nasional, yaitu agenda menciptakan Indonesia yang adil dan demokratis, dan agenda meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasar pada ketentuan ketentuan dasar tersebut diatas, Pemerintah menyadari akan realitas bangsa dan negara ini yang masih berada dalam kemiskinan, untuk itu pemerintah berusaha mencari solusi agar kemiskinan ini dapat diperkecil, permasalahannya adalah bagaimana memperkuat kemampuan masyarakat lapisan bawah yang masih berada dalam kondisi yang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan, keterbelakangan dan membutuhkan pertolongan agar lebih berdaya dalam kemandirian, keswadayaan, partisipasi, dan demokratisasi.. Miskinnya bangsa ini disebabkan oleh berbagai hal baik dikarnakan oleh struktural maupun kultural masyarakat.

sehingga mendorong pemerintah untuk tanggap dan mampu mengatasinya, dengan berbagai macam program telah dituncurkan antara lain IDT, P2KP, P4K, PPK Raskin dan Askes Gakin dll. yang salah satunya di tahun 2007 adalah adanya **Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK)**.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) adalah kebijakan dan Program Pemberdayaan Masyarakat perdesaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengakselerasi penanggulangan kemiskinan secara terpadu berkelanjutan. PNPM-PPK merupakan kelanjutan PPK yang secara nasional dinilai berhasil, keberhasilan PPK diantaranya *pertama* Program ini berhasil menyediakan lapangan kerja bagi rakyat miskin (Mengatasi masalah pengangguran) *Kedua* hasil evaluasi yang dilakukan secara independen menunjukkan program ini telah teruji baik dilihat dari perencanaan, tujuannya maupun efisiensinya. Penghematan dari program ini rata-rata mencapai 56 % artinya sarana dasar yang dibangun dengan program ini berhasil menekan biaya sebesar 56 % di bandingkan program serupa yang dibangun oleh pemerintah melalui pihak ketiga. *Ketiga* dari hasil penelitian independen, program ini berhasil mewujudkan model perencanaan dari bawah (*Bottom up planning*) atau lebih dikenal dengan perencanaan partisipatif, sehingga mendekatkan antara kebutuhan riil masyarakat dengan program pembangunan nasional. Hal ini tentunya menuntut pula paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pembinaan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan *Surat Mendagri Nomor 414.2/675/PMD tanggal 13 April 2007* perihal Penegasan Pelaksanaan Lokasi dan alokasi BLM PNPM melalui PPK TA 2007 dan surat Mendagri Nomor : 414.2/798/PMD tanggal 4 Mei 2007 perihal penjelasan Kebijakan tambahan dan/atau penyempurnaan PTO PPK III dan petunjuk teknis sebagaimana surat Dirjen PMD Nomor : 414.2/979/PMD tanggal 30 Mei 2007 perihal petunjuk teknis Operasional PMPN-PPK

Tahun 2007. dalam rangka akselerasi penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, maka pada tahun 2007 pemerintah pusat telah menggulirkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah menetapkan 7(Tujuh) Kecamatan sebagai pelaksana program yang di antaranya adalah Kecamatan Muara Badak sebagai sasaran program. .

Memperhatikan luasan teritorial, geografis dan sebaran penduduk yang masih berada di jajaran kemiskinan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam proses akselerasi pembangunan maka pelaksanaan Program pemberdayaan masyarakat adalah hal yang perlu dilakukan. Dengan demikian *penelitian tentang "Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Program Pengembangan Kecamatan (PNPM PPK)"* dipandang perlu untuk dilakukan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pelaksanaan PNPM - PPK dijalankan..
- b. Sejauh mana kontribusi Pemerintah Daerah dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PNPM - PPK
- c. Apa Faktor Penghambat dan Penunjang dalam Implementasi PNPM PPK di Kecamatan Muara Badak.

Tujuan Penelitian.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui realitas implementasi kebijakan program PNPM PPK di Kecamatan Muara Badak, namun secara spesifik tujuan penelitian ini adalah untuk dapat :

- a. Mengetahui pemberdayaan kemampuan sumberdaya masyarakat dalam program PNPM-PPK
- b. Mendiskripsikan bentuk dan proses pemberdayaan yang dilakukan pemerintah daerah

- c. Mendiskripsikan faktor faktor penghambat dan penunjang dalam pengembangan pemberdayaan masyarakat..

Manfaat Penelitian

Bila tujuan penelitian ini tercapai, maka hasil penelitian ini akan memiliki manfaat praktis dan teoritis.

Manfaat praktis

Secara praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan input dalam rangka menyusun kebijakan pengembangan pemberdayaan masyarakat (*Policy Empowerment*) dan melakukan penyempurnaan bagi upaya pemberdayaan masyarakat di pedesaan. Memberikan informasi program pengembangan pemberdayaan masyarakat tentang faktor faktor penghambat pemberdayaan dan cara pemecahannya.

Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakat yang berkaitan dengan program PNPM PPK terutama pada aspek pengembangan sistem pemberdayaan masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Teori/Pengkajian Teori.

Konsep Kebijakan Publik.

Menurut Tomas Dye (1978) memberikan definisi kebijakan publik sebagai „*is whatever governments choose to do or not to do*“ Edward dan Sharkansky (1978) dalam Islamy (1978:18-10) mengartikan Publik policy yang hampir mirip dengan devinisi Dye tersebut diatas yaitu „*is what governments say und do, or not do, it is the goal or purpose of government program.*“ (“adalah apa yang dinyatakan dan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. kebijakan publik itu berupa sasaran atau tujuan program program pemerintah”) Secara umum dapat disimpulkan bahwa kebijakan dapat berupa

peraturan peraturan , ketetapan ketetapan, instruksi dan keputusan keputusan ataupun tindakan yang mengarah pada suatu pencapaian tujuan. Jadi setiap kebijakan yang dikembangkan oleh badan atau pejabat pemerintah dapat disebut kebijakan publik, dengan demikian kebijakan publik tidak hanya dibuat oleh lembaga / badan negara tertinggi saja, dinegeri kita seperti lembaga tertinggi MPR dan lembaga tinggi, Presiden, DPR, MA, DPA dan BPK, tetapi juga oleh Badan / Pejabat disemua jenjang pemerintahan..

Implementasi Kebijakan Publik.

Menurut pendapat Udoji dalam (Abdul Wahab, 2004 : 59) dengan tegas mengatakan bahwa “*The execution of policies is a important if not more important than policy making. Policies will remain dreams or blue printsfile jackets unless they are implemented*” (Pelaksanaan kebijaksanaan adalah sesuatu yang penting, bahwa mungkin jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijaksanaan. Kebijaksanaan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan).

faktor faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik.

Implementasi Kebijakan adalah merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan sebagaimana pendapat Udoji (Dalam Abdul Wahab, 2004:59) adalah sebagai berikut :

The execution of policies is as importan if not more important than policy making policies will remain dreams or blue prints file jackets unless they are implemented(Pelaksanaan kebijaksanaan adalah sesuatu yang penting, bahwa mungkin jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijaksanaan kebijaksanaan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang terhimpun rapi dalam arsip kalau tidak di implementasikan)

Bahwa keberhasilan implementasi tergantung pada faktor faktor seperti berikut:

1. Persetujuan, dukungan dan kepercayaan rakyat.

2. Isi dan tujuan kebijakan haruslah dimengerti secara jelas terlebih dahulu.
3. Pelaksanaan haruslah mempunyai cukup informasi, terutama mengenai kondisi dan kesadaran masyarakat yang di kenal kebijakan itu.
4. Pembagian pekerjaan yang efektif dalam pelaksanaan.
5. Pembagian kekuasaan dan wewenang (desentralisasi) yang rasional dalam pelaksanaan Kebijakan.
6. Pemberian tugas tugas dan kewajiban kewajiban (Dekonsentrasi) yang memadai dalam Pelaksana kebijakan (Sunarko, 2000:186)

Akan tetapi didalam kenyataannya kebijakan Pemerintah menurut pendapat **Hogwood dan Gunn (dalam Abdul Wahab, 2004:61-62)** membagi kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan kedalam 2 kategori yakni :

- 1) Non Implementation (tidak terimplementasi). Tidak terimplementasi mengandung alasan:
 - a. Kebijakan itu tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana
 - b. Mungkin pihak yang terkait didalam pelaksanaannya tidak mau bekerjasama
 - c. Bekerja tidak efisien
 - d. Hambatan hambatan yang tidak sanggup ditanggulangi
- 2) Unsuccessful Implementation (Implementasi yang tidak berhasil). Implementasi yang tidak berhasil mengandung alasan :
 - a. Kondisi eksternal yang tidak menguntungkan
 - b. Kebijakan tersebut tidak berhasil mewujudkan dampak atau hasil yang dikehendaki.

Pemberdayaan Masyarakat (Empowerment)

Menurut **AMW Pranaka (1996 : 44)** *Empowerment*, yang dalam bahasa Indonesia berarti "*Pemberdayaan*" adalah sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran masyarakat dan kebudayaan barat, utamanya eropa, dan untuk memahami konsep Empowerment secara

tepat dan jernih memerlukan upaya pemahaman latar belakang kontekstual yang melaluikannya. Konsep tersebut telah begitu luas diterima dan dipergunakan mungkin dengan pengertian dan persepsi yang berbeda satu dengan lainnya. Dalam mengkaji pemberdayaan, sebageian besar literatur mengakui umumnya para ahli memberikan batasan yang berbeda mengenai pengembangan pemberdayaan masyarakat. Ketidaksamaan ini dapat dimaklumi karena para ahli melihat suatu fenomena dari sudut pandang dan persepektif yang berbeda. Pemerintah telah berusaha membenahi dan menyusun berbagai macam kebijakan yang diharapkan dapat memacu pengembangan sumber daya manusia , kebijakan itu mencakup usaha peningkatan keahlian (Profesionalisme). Peningkatan itu antara lain dilakukan melalui pendekatan perluasan sarana dan mutu pendidikan dalam semua sektor, serta peningkatan produktivitas tenaga kerja, namun sayang ranah pendidikan perguruan tinggi belum terjangkau oleh masyarakat umum dan tampaknya pendidikan masih menjadi barang mewah yang amat mahal. Sejak tahun 1993 pemerintah telah bertekad untuk menanggulangi kemiskinan dengan meluncurkan program IDT, P2KP dan PNPM PPK yang secara keseluruhan program bertujuan mengentaskan kemiskinan melalui penguatan kapasitas pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat. Peran Pemda dalam pembinaan dan pelestarian Program melalui langkah-langkah sbb :

1. Menjaga hasil pelaksanaan dan memfasilitasi pemeliharaannya.
2. Melembagaan (internalisasi dan institusionalisasi) Sistem dan mekanisme PNPM PPK.
3. Mendorong sistem dan mekanisme PNPM PPK dapat di integrasikan dan di kembangkan

Dalam penyelenggaraan pembangunan berbasis masyarakat, untuk mencapai hasil yang optimal maka diperlukan upaya integrasi PNPM-PPK dalam sistem pembangunan daerah , antara lain dengan upaya Sbb :

- Mengembangkan PNPM-PPK sebagai pusat pengetahuan (*Knowledge center*)

dan media pembelajaran (*Lessons Learned*)

- Mendorong pemda menformulasikan prinsip, pendekatan sistem dan mekanisme PNPM-PPK dalam bentuk kebijakan daerah.
- Mendorong pemda melakukan internalisasi dan institusional dalam kelembagaan pembangunan daerah.

Organisasi pelaksanaan proyek.

Berdasarkan desain programnya masyarakat adalah pelaku utama PNPM - PPK mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian, sedangkan pelaku lainnya di desa, Kecamatan dan Kabupaten dan seterusnya berfungsi sebagai pelaksana, fasilitator, pembimbing dan pembina agar tujuan, prinsip prinsip, kebijakan prosedur dan mekanisme PNPM - PPK dapat tercapai dan dilaksanakan secara benar dan konsisten.

Pendanaan.

Bantuan langsung kepada masyarakat (BLM) berupa dana yang akan dipergunakan oleh masyarakat dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan sarana prasarana sosial dasar dan ekonomi. Bantuan ini diperuntukkan kepada masyarakat di Kecamatan, terutama dimanfaatkan oleh penduduk miskin, sedangkan besaran dan BLM menggunakan kriteria sebagai berikut :
 Besar BLM untuk wilayah luar jawa dan Bali :

Tabel 2.1 Alokasi Bantuan BLM

Jumlah Penduduk	% Penduduk Miskin	Alokasi BLM
	< 20 %	500.000.000,-
< 15.000	20 % - 40 %	750.000.000,-
	< 40%	1.000.000.000,-
15.000 s.d	< 20%	750.000.000
20.000	20 % - 40 %	1.000.000.000,-
	< 40%	1.250.000.000,-
	< 20%	1.000.000.000,-
< 25.000	20% - 40%	1.250.000.000,-
	< 40%	1.500.000.000,-

Sumber dan Alokasi Dana PNPM PPK

Sumber dana berasal dari :

1. Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
2. Cost Sharing dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
3. Partisipasi Dunia Usaha
4. Swadaya Masyarakat

Kedudukan Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat.

Strategi Pemda dalam pembinaan dan pelestarian program PNPM-PPK :

- Tetap menempatkan masyarakat sebagai subyek dalam penyelenggaraan pembangunan.
- Sistem dan lembaga yang telah dibangun oleh PNPM PPK tetap dipertahankan dan dikembangkan sesuai dengan kondisi dan orientasi pengembangan daerah.
- Terdapat perlindungan dari Pemda agar tercipta iklim demokratisasi dan partisipasi dalam bentuk regulasi di daerah.
- Dapat mendorong dan mengembangkan terwujudnya otonomi desa serta mendorong terwujudnya kerjasama antar desa secara nyata dan melembaga.
- Didukung oleh koordinasi yang aktif lintas sektoral pada instansi pemerintahan pada level eksekutif dan legislatif daerah.

.. Menggali sumber sumber pendanaan pembangunan secara lebih luas. khususnya dari APBD dan dan lainnya.

Peranan pemerintah daerah dalam mendukung satu kebijakan pembangunan yang bersifat *pemberdayaan* dan *partisipatif* adalah sangat penting, ini karena pemerintah daerah *adalah* instansi pemerintah yang paling mengenal potensi daerah dan juga mengenal kebutuhan rakyat setempat.

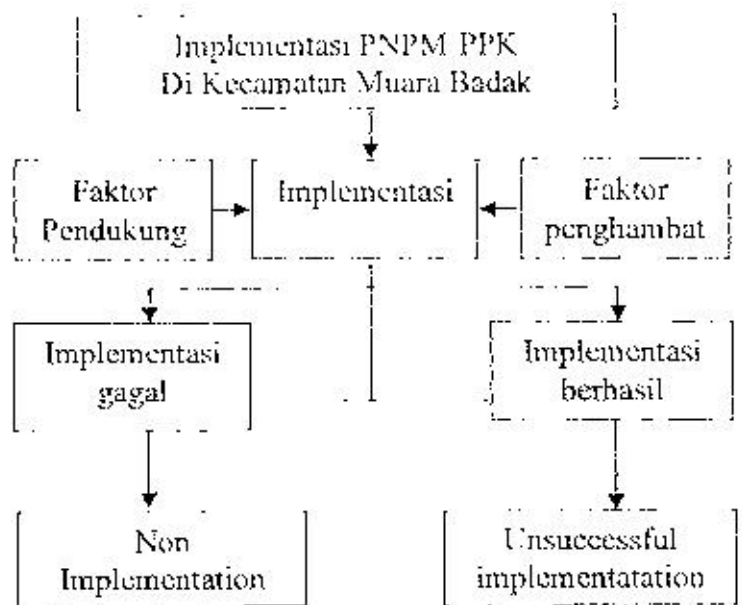
Partisipasi Masyarakat dalam Program PNPM-PPK.

Keberhasilan program pembangunan desa terpadu selain ditentukan oleh kesiapan aparat dan organisasi penyelenggara program juga dipengaruhi oleh kesiapan masyarakat penerima program. Hal itu disebabkan oleh karena input program yang bersifat material dan finansial maupun berupa pelayanan, baru efektif apabila mendapat tanggapan positif dari masyarakat. Tanggapan tersebut terutama berupa munculnya aktifitas lokal yang dirangsang oleh program. Selanjutnya melalui aktifitas lokal tersebut diharapkan masyarakat dapat memetik manfaat dari program yang berjalan. Bagi program PNPM-PPK tidak semata mata berorientasi pada *delivery and charity aproach* melainkan juga berorientasi *pemberdayaan* keberhasilan ditunjukkan oleh tumbuhnya aktifitas lokal dan dirasakannya manfaat program selama program berlangsung.

Alur Pikir.

Kerangka alur pikir yang berdasarkan tinjauan teori yang berhubungan Implementasi Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan di Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara disusun alur pikir penelitian sbb:

Tabel 2.2 Alur pikir Penelitian



METODE PENELITIAN

Untuk menemukan model alternatif sistem dan pengembangan manajemen pemberdayaan dalam menyiapkan sumber daya masyarakat yang optimal, dengan unsur unsur pokok yang harus ditemukan sesuai dengan butir butir rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, maka digunakan metode penelitian kualitatif.

Penelitian kualitatif pada hekekatnya adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya (Nasution, 1988:5). Dalam penelitian ini yang akan diamati adalah orang, yaitu mesyarakat pedesaan dan para pelaku program PNPM PPK dengan berbagai latar belakangnya. Warga masyarakat pedesaan mempunyai suatu kegiatan yang berupa tugas tugas partisipasi dalam kegiatan pembangunan yang harus dikerjakan oleh masyarakat secara swadaya swakelola. Warga masyarakat tersebut berada dalam tempat tertentu adalah desa desa yang mendapatkan bantuan program PNPM PPK. Interaksi antara masyarakat dan para pelaku program PNPM PPK akan menghasilkan suatu situasi dan kondisi sosial tertentu.

Dengan digunakan metode kualitatif maka data yang didapat akan lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel dan bermakna sehingga tujuan penelitian dapat dicapai.

Rancangan Penelitian/Perspektif pendekatan penelitian.

Salah satu karakteristik ilmu pengetahuan adalah selalu mengalami perkembangan, dan salah satu cara untuk membuat perkembangan ilmu pengetahuan adalah dengan melakukan penelitian. Untuk mempermudah seseorang menemukan atau mencari hasil penelitian, dibuatlah pengelompokan pengelompokan. Dengan adanya pengelompokan ini, muncul jenis jenis penelitian. Jadi jenis jenis penelitian hanya sebuah upaya untuk mengklasifikasi penelitian yang sudah ada yang bertujuan untuk memudahkan bagi kita.

Penelitian deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena. Hasil akhir penelitian ini biasanya berupa Tipologi atau pola pola mengenai fenomena yang sedang dibahas.

Penelitian ini bisa juga dikatakan sebagai kelanjutan dari penelitian eksploratif. Penelitian eksploratif telah menyediakan gagasan dasar sehingga penelitian ini mengungkapkan secara lebih detail. Penelitian ini diidentikkan dengan penelitian yang menggunakan pertanyaan "BAGAIMANA" dalam mengembangkan informasi yang ada. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah :

1. menggambarkan mekanisme sebuah proses
2. menciptakan sebuah kategori atau pola

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian *diskriptif kualitatif*, dimana rumusan masalah akan dijawab berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, baik dari data primer maupun data sekunder. Penelitian deskriptif bermaksud membuat penyandaraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta fakta dan sifat sifat populasi tertentu. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang situasi situasi sosial seperti adanya program PNPM PPK. Kebanyakan penelitian sosial bersifat deskriptif. Dibanding dengan penelitian eksploratif, penelitian deskriptif lebih spesifik dengan memusatkan perhatian kepada aspek aspek tertentu dan sering menunjukkan hubungan antara berbagai variabel.

Ciri ciri metode penelitian kualitatif adalah :

1. Sumber data ada dalam situasi yang wajar, tidak dimanipulasi oleh angket.
2. Laporrannya sangat deskriptif
3. Mengutamakan proses dan produk
4. Peneliti sebagai instrumen peneliti
5. Mencari makna, dipandang dari pikiran dan perasaan responden
6. Sampel terpilih secara purposif
7. Analisis data dilakukan sejak awal sampai penelitian berakhir

8. Desain peneliti tampil selama proses penelitian.

Menurut Sugiyono (2005:3) metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tapi lebih menekankan pada makna.

Pada penelitian ini yang menggunakan metode deskriptif kualitatif tidak saja terbatas pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi data yang telah dikumpulkan dan penelitian ini lebih mengarahkan pada penelitian jenis studi kasus dengan lebih memusatkan perhatian pada satu kasus secara mendalam.

Ruang lingkup/Fokus Penelitian.

Dalam pandangan penelitian kualitatif, gejala itu bersifat holistik (menyeluruh) tidak dapat dipisah-pisahkan sehingga peneliti kualitatif tidak akan menetapkan penelitiannya hanya berdasarkan variabel penelitian akan tetapi keseluruhan situasi sosial yang diteliti yang meliputi aspek tempat (*Place*) Pelaku (*Aktor*) dan kegiatan (*actifitus*) yang berinteraksi secara sinergis. Fokus sangat berhubungan dengan rumusan masalah sehingga masalah penelitian pada hakikatnya merupakan fokus penelitian, hal tersebut sesuai dengan sifat pendekatan kualitatif yang lentur, dan mengikuti pola pemikiran yang bersifat *empirical inductive* dimana sesuatu dalam penelitian ini ditentukan dari hasil akhir pengumpulan data yang mencerminkan keadaan yang sebenarnya dilapangan. Dengan memperhatikan perumusan masalah tersebut diatas maka *fokus penelitian* ini adalah sebagai berikut :

1. Implementasi Kebijakan PNPM PPK dijalankan.
2. Kontribusi Pemerintah Daerah dan Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan PNPM-PPK.
3. Faktor Penghambat dan Penunjang dalam Implementasi PNPM PPK di Kecamatan Muara Badak.

Lokasi Penelitian

Lokasi yang ditentukan dalam penelitian ini adalah 11 desa dari 13 desa yang ada di kecamatan sebagai pelaksana program PNPM-PPK di Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan pertimbangan Kecamatan Muara Badak merupakan salah satu dari tujuh Kecamatan yang menerima program PNPM PPK tahun 2007 di Kabupaten Kutai Kartanegara dan terletak di wilayah kutai pantai, yang merupakan daerah strategis sebagai penghasil minyak dan gas sebagai pemasok dana perimbangan terbesar di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kalimantan Timur pada Umumnya.

Pertimbangan lain adalah calon peneliti cukup mengenal dengan baik desa desa sebagai obyek penelitian sehingga memudahkan dalam menggali informasi guna mendukung proses penelitian yang dimaksud dengan situs adalah tempat dimana menangkap keadaan yang sederhana dari obyek yang diteliti, oleh karenanya yang menjadi situs dalam penelitian ini adalah desa desa peserta program PNPM-PPK di Kecamatan Muara Badak, adapun desa yang ikut program PNPM-PPK adalah Sbb :

1. Desa Salo Palai
2. Desa Muara Badak ulu
3. Desa Mauara Badak Ilir
4. Desa Gas Alan
5. Desa tanjung limau
6. Desa Badak Baru
7. Desa Batu Batu
8. Desa Tanah datar
9. Desa Badak Mekar
10. Desa Salo cela
11. Desa Suka damai.

Desa desa tersebut dianggap layak dan sesuai dengan keperluan penelitian sehingga dapat lebih mudah memperoleh data dan informasi dengan tepat cepat dan akurat, sikap serta perasaan subyektif tetap dihindarkan selama dalam pelaksanaan penelitian.

Sumber Data.

Penentuan sumber data akan menggunakan teknik *Purpose Sampling* dan *Snowball Sampling* dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut yang

dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai pelaku atau penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek /situasi sosial yang diteliti. Snowball Sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit kemudian menjadi besar, hal ini dilakukan bila data yang sedikit itu belum memuaskan maka diperlukan orang lain untuk sumber data. Adapun sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah para pelaku Program PNPM PPK dan Masyarakat yang terdiri dari TPK, UPK, FK/FT dan PJOK serta aparat pemerintah setempat.

Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini disesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, sampel sumber data dipilih, dan mengutamakan perspektif emic, artinya mementingkan pandangan informan, yakni bagaimana mereka memandang dan menafsirkan dunia dari pendiriannya. Peneliti tidak bisa memaksakan kehendaknya untuk mendapatkan data yang diinginkan.

Sesuai dengan fokus penelitian, maka yang dijadikan sampel sumber data dan teknik pengumpulan data adalah seperti berikut :

1. Untuk mendapatkan data tentang implementasi kebijakan pemberdayaan melalui para pelaku dalam program PNPM PPK, sumber datanya adalah di setiap desa. Teknik pengumpulan datanya dengan study dokumentasi dan wawancara dengan fasilitator kecamatan, fasilitator teknik, UPK, TPK, dan PJOK.
2. Untuk mendapatkan data tentang potensi dan profil desa, maka sumber datanya dari desa yang dikerjakan oleh bagian bagian tertentu.
3. Untuk mendapatkan data tentang kompetensi pelaku program, sumber datanya adalah para pelaku program, yang terdiri dari TPK dan UPK serta pemerintahan desa.
4. Untuk mendapatkan data tentang faktor faktor yang mempengaruhi penampilan kinerja para pelaku program, sumber datanya adalah dokumentasi hasil kinerja,

teknik pengumpulan datanya dengan wawancara dan instrumen sederhana.

5. Untuk mendapatkan data tentang sistem evaluasi pemberdayaan, sumber datanya adalah Tim monitoring dan warga masyarakat serta ketua TPK dengan teknik pengumpulan datanya melalui observasi dan wawancaraserta dokumentasi.

Dalam pengumpulan data penelitian ini, ada tiga proses kegiatan yang akan dilakukan oleh peneliti menurut pendapat Nasution (1998:34).

1. Proses memasuki lokasi penelitian (Getting In)

Dalam usaha mendapatkan data yang valid peneliti tetap melakukan proses pendekatan yang prosedural dan personal kekeluargaan dari sisi prosedur peneliti membawa surat ijin penelitian dari sivitas akademik Universitas Mulawarman Samarinda menemui pimpinan kecamatan dan kepala kepala desa wilayah sasaran untuk menyampaikan maksud dan tujuan dalam penelitian dari sisi hubungan personal peneliti berusaha menjalin hubungan kekeluargaan dan berbaur dengan para informan untuk mendapatkan informasi yang akurat.

2. Ketika berada dilokasi penelitian (Getting a long)

Peneliti berusaha menjalin hubungan secara pribadi dan mengakrabkan diri untuk lebih mengetahui secara personal guna menciptakan komunikasi yang efektif dengan informan untuk memperoleh informasi yang selengkap lengkapnya, serta berusaha menangkap makna yang tersirat serta intisari dari berbagai informan yang dapat diperoleh.

3. Mengumpulkan data (Logging the date)

Berdasarkan jenis dan sumber data yang diperlukan teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi :

1. Wawancara mendalam (indepth interview) wawancara ini tidak dilaksanakan dengan struktur yang ketat akan tetapi dengan pertanyaan pertanyaan yang semakin menfokus pada permasalahan sehingga informasi yang di kumpulkan cukup mendalam. Kelonggaran semacam ini akan dapat

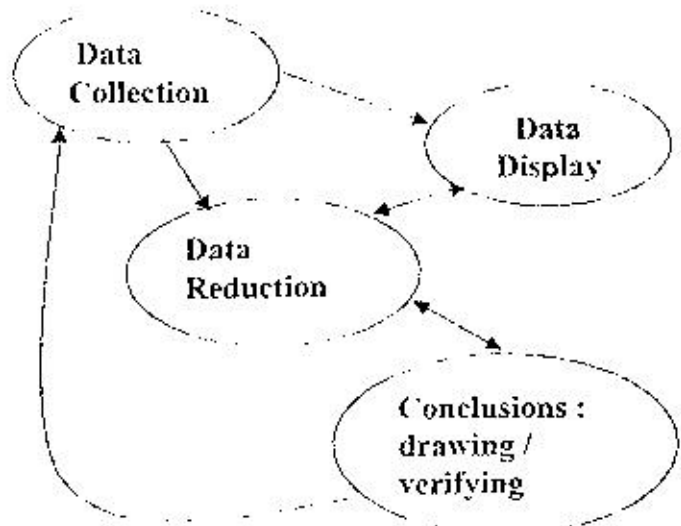
memperoleh kejujuran untuk memberikan informasi yang sebenarnya terutama yang berkenaan dengan perasaan Sikap dan pandangan mereka terhadap pelaksanaan kerjanya. Teknik wawancara ini dilakukan dengan semua informan yang ada pada lokasi penelitian terutama untuk mendapatkan data primer dari para informan.

2. Analisis dokumentasi, untuk mendapatkan data sekunder maka dilakukan analisis dokumentasi dengan cara pengumpulan data yang bersumber dari arsip dan dokumen dokumen yang ada pada masing masing situs (lokasi Peneliti) . dalam hal ini informasi berasal dari berbagai arsip maupun dokumen dokumen lain yang dianggap perlu.
3. Observasi langsung (partisipasi pasif), Observafasi langsung semacam ini dilaksanakan oleh peneliti dengan cara formal maupun informal untuk mengamati berbagai kegiatan kegiatan atau peristiwa yang terjadi pada saat pelaksanaan kegiatannya, hal ini digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dengan tiga teknik tersebut diatas (baik primer maupun sekunder)

Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Miles and Huberman dan Spradley.

Miles and Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification. Janglah langkah analisis data ditunjukkan pada gambar berikut :



Selanjutnya menurut Spradley teknik analisis data disesuaikan dengan tahapan dalam penelitian. Pada tahap penjelajahan dengan teknik pengumpulan data grand tour question, analisis data dilakukan dengan analisis domain. Pada tahap menentukan fokus analisis data dilakukan dengan analisis taksonomi. Pada tahap selection, analisis data dilakukan dengan analisis kompenensial. Selanjutnya untuk sampai menghasilkan judul dilakukan analisis tema.

Teknik ini merupakan suatu lanjutan dari proses pengolahan data untuk melihat atau menginterpretasikan data, kemudian menganalisis data dari hasil yang sudah ada pada tahap hasil pengolahan data, selanjutnya data tersebut dikumpulkan dan dituangkan dalam bentuk laporan lapangan. Tujuan analisis data adalah untuk mengungkapkan data apa yang masih harus dicari, hipotesis apa yang perlu diuji, pertanyaan apa yang perlu dijawab, metode apa yang harus digunakan untuk mendapatkan informasi baru dan kesalahan apa yang harus segera diperbaiki. Analisa data dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti analisis univariat, analisis bivariat, dan analisis multivariat.

Keabsahan Data

Standar untuk melihat derajat kepercayaan atau kebenaran terhadap hasil penelitiannya dengan setiap penelitian memerlukan penelitian kualitatif standar tersebut disebut sebagai keabsahan data. Uji keabsahan data dalam penelitian, sering

hanya ditekankan pada uji validasi dan reliabilitas. Dalam penelitian kuantitatif, kriteria utama terhadap data hasil penelitian adalah : Valid, reliabel dan obyektif. Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data "*yang tidak berbeda*" antar data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian. Kalau dalam obyek penelitian terdapat warna merah, maka peneliti akan melaporkan warna merah, kalau dalam obyek penelitian para pegawai bekerja dengan keras, maka peneliti melaporkan bahwa pegawai bekerja dengan keras. Bila peneliti membuat laporan yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi pada obyek, maka data tersebut dapat dinyatakan tidak valid.

Terdapat dua macam validitas penelitian, yaitu validitas internal dan validitas eksternal. Validitas internal berkenaan dengan derajat akurasi desain penelitian dengan hasil yang dicapai. Kalau dalam desain penelitian dirancang untuk meneliti etos kerja pegawai, maka data yang diperoleh seharusnya adalah data yang akurat tentang etos kerja pegawai. Penelitian menjadi tidak valid, apabila yang ditemukan adalah motivasi kerja pegawai.

Menurut **Moleong (1990)** dan **Nasution (1996)**, untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan yang berdasarkan pada 4 kriteria yaitu :

a) *Derajat Kepercayaan (credibility)*

Pada dasarnya penerapan kriteria derajat kepercayaan menggantikan konsep validitas internal dan eksternal (generalisasi). Kriteria ini berfungsi untuk melakukan pengamatan sedemikian rupa, sehingga tingkat kepercayaannya dapat dicapai serta menunjukkan derajat kepercayaan hasil hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti. Beberapa cara yang digunakan dalam pengujian Validitas data penelitian akan dilakukan dalam hal ini adalah :

- 1) Memperpanjang masa observasi
- 2) Pengamatan yang terus menerus
- 3) Triangulasi data

4) Membicarakannya dengan orang lain yang mempunyai pengetahuan tentang pokok pemberdayaan dan juga tentang metode kualitatif

5) Mengadakan "Member Check" (Pengecekan Anggota)

b) *Pengujian Keteralihan (Transferability)*

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif, validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil.

Keteralihan sebagai persoalan cupiris bergantung pada persamaan antar konteks pengirim dan penerima. Untuk melakukan pengalihan tersebut seorang peneliti perlu mencari dan mengumpulkan data kejadian empiris dalam konteks yang sama. Dengan demikian peneliti bertanggung jawab untuk menyediakan data deskripsi secukupnya.

c) *Pengujian Kebergantungan (Dependability)*

Depennability dalam penelitian kuantitatif disebut reliabilitas, suatu penelitian yang reliabel adalah apabila orang lain dapat mengulangi proses penelitian tersebut. Dalam penelitian kualitatif uji depennability dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian

Kebergantungan menurut istilah konvensional disebut dengan reliabiliter. Reliabilitas merupakan syarat mutlak bagi tercapainya penelitian yang valid. Untuk mendapatkan tujuan tersebut, maka hal yang perlu dilakukan adalah memadukan kriteria kebergantungan dan kepastian.

d) *Pengujian Kepastian (konfirmability)*

Konfirmabilitas mirip dengan uji dependabilitas sehingga konfirmability berarti menguji hasil penelitian dan dapat dilakukan secara bersamaan yang dikaitkan dengan proses yang dilakukan, bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan maka penelitian tersebut telah memenuhi standar konfirmability.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian.

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Muara Badak memiliki luas 1043 km dengan batas wilayah administratif sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Marangkayu
- Sebelah timur berbatasan dengan Selat makasar.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Anggana
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Samarinda Utara dan Kecamatan Penggarong Sebrang.

Secara administratif kecamatan Muara Badak di bagi dalam 13 wilayah desa divinitif Yaitu Desa Saliki, Salok Palai, Muara Badak Ulu, Muara Badak Ilir, Gas Alam, Badak Baru, Tanjung Limau, Tanah Datar, Badak Mekar, Suka damai, Selo Celak Batu Batu dan Sungai Bawang dengan topografi wilayah kecamatan Muara Badak sebagian besar berbukit dengan kemiringan datar sampai landai serta ketinggian 2 m dpl.

Kecaulan penduduk.

Penduduk/masyarakat Kecamatan Muara Badak mengalami peningkatan yang konstan dari tahun ketahun, berdasarkan data statistik penduduk Muara Badak tahun 2006 berjumlah 32.341 Jiwa dan ditahun 2007 berkisar 36.368 jiwa yang tersebar di 13 desa sebagaimana tabel sbb :

Tabel 4.1 Jumlah Kepala Keluarga, Penduduk dan kepadatan menurut Desa di Kecamatan Muara Badak Tahun 2007.

No	Nama Desa	KK	Laki laki	Perempuan	Jumlah I-P
1	Saliki	678	1501	1127	2628
2	Salok Palai	300	643	516	1159
3	Muara Badak Ulu	937	2042	1836	3879
4	Muara Badak Ilir	845	915	1646	2561
5	Gas Alam	1291	517	2591	3108
6	Badak Baru	1914	727	4118	4845
7	Batu Batu	754	844	457	1301
8	Tanjung Limau	927	2008	1920	3928
9	Selo Celak	474	818	785	1603
10	Tanah Datar	552	4295	840	5135
11	Badak Mekar	312	2769	554	3343
12	Suka Damai	340	670	614	1284
13	Sei Bawang	314	838	772	1595
	Jumlah	9068	18567	17776	36369

Dari penyebaran penduduk yang ada di seluruh desa di Kecamatan Muara Badak duhuni oleh beberapa etnis dan mayoritas penduduknya didominasi oleh suku bugis kemudian jawa, banjar, kutai dayak menado dan lain lain dengan pemeluk agama mayoritas islam kemudian kristen dan lainnya.

Perekonmian masyarakat Muara Badak masih berada pada kisaran rendah dengan tingkat penduduk miskin sekitar 3668 Jiwa (Penerima BLT) dan 3673 Jiwa (Penerima Raskin) (Data Kantor Camat) atau sekitar 30 % dari jumlah penduduk dari baru menerima bantuan program pemerintah sekitar 20 % adapun data penerima BLT dan raskin perdesa adalah Sbb:

Tabel 4.2 Jumlah Kepala Keluarga yang menerima Bantuan raskin dan BLT Tahun 2007

No.	Desa	Jml Penerima raskin / KK	Jml penerima BLT / KK
1.	Saliki	100	220
2.	Salo Palai	162	93
3.	Muara Badak Dijr	278	335
4.	Muara Badak Ulu	291	300
5.	Ons Alam	603	554
6.	Tanjung Limau	527	447
7.	Badak Baru	294	545
8.	Batu Batu	143	80
9.	Badak Mekar	311	271
10.	Suka Damai	308	107
11.	Salo Cela	340	343
12.	Tanah Datar dan Sungai Bawang Jumlah	3.673	3.668

Faktor penunjang dan Penghambat Implementasi.

Faktor Penunjang.

Kebijakan program PNPM-PPK dapat berhasil secara maksimal karena adanya beberapa hal yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan sesuai alur program, beberapa faktor penunjang tersebut antara lain :

1. Adanya alokasi dana APBD untuk program PNPM-PPK
2. Masih tingginya kesadaran bergotong royong bagi warga masyarakat
3. Adanya konsultan manajemen dan Teknik.
4. Partisipasi masyarakat.
5. Tersedianya SDA dan SDM sebagai Pelaku program.

Faktor Penghambat.

Beberapa faktor yang dapat menghambat implementasi kebijakan :

1. tingkat pendidikan masyarakat yang rata-rata masih rendah.
2. Pengalaman pola pembangunan yang tidak berorientasi pada pemberdayaan.
3. Belum adanya dana pendukung untuk kegiatan ditingkat desa dan Kecamatan.
4. Belum dipahaminya secara
5. Menyeluruh program PNPM-PPK

7. Kurangnya pembinaan langsung dari
8. Satker kabupaten.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Implementasi Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan di Kecamatan Muara Badak telah dilaksanakan secara maksimal oleh para pelaku program yang terdiri dari :

1. Pelaku Program PNPM-PPK tingkat Desa :

Kepala Desa.

- Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

- Tim Pengelola Kegiatan (TPK)

Tim Penulis Usulan (TPU)

- TIM Pemantau

- Tim Pemelihara

- Kader Penggerak Masyarakat Desa (KPMD)

2. Pelaku Program PNPM-PPK tingkat Kecamatan :

- Camat

- Penanggung jawab Operasional Kegiatan (PJOK)

- Penanggung jawab administrasi Kegiatan (PIAK)

- TIM verifikasi

- Unit Pengelola Kegiatan (UPK)

- Badan pengawas

- Fasilitator Kecamatan (FKL) Fasilitator teknik (FT)

- Pendamping Lokal

- Badan Kerjasama antar Desa

- Setyawan Kecamatan

Dengan hasil kegiatan secara fisik mendekati kesempurnaan bila diukur dengan babot rencana kegiatan yang berupa tersedianya sarana pengerasan jalan dan jembatan, Posyadu, Gedung Sekolah TK, MCK, Listrik dan semenisasi gang. Serta kegiatan ekonomi yang berupa simpan pinjam perempuan (SPP) yang secara keseluruhan nilai dananya sebesar Rp. 1.250.000.000. (Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat cukup memadai dengan okonolasi dana partisipasi berjumlah Rp. 130.450.000 (Seratus Tiga

Puluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) atau 11 % dari bantuan pemerintah

Berdasarkan hal hal tersebut diatas maka dalam upaya Implementasi Kebijakan PNPM-PPK di Kecamatan Muara Badak secara keseluruhan dapat dikatakan telah terrealisasi sesuai dengan tujuan program

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan.

1. Program PNPM PPK adalah salah satu model pembangunan partisipatif yang dapat mendorong pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan dalam nilai nilai sosial kebersamaan guna meningkatkan kemampuan dan kemandiriannya.
2. Sistem dan mekanisme dalam tahapan tahapan kegiatan PNPM PPK yang telah ditetapkan merupakan panduan mutlak atas terselenggaranya alur kegiatan secara menyeluruh sebagai tolak ukur keberhasilan program PNPM-PPK.
3. Peran pelaku program yang utama masih didominasi oleh fasilitator, sehingga sebagai fasilitator harus memiliki kemampuan memotifasi dan mengevaluasi secara kreatif setiap informasi yang diperoleh dari para pelaku program untuk diolah menjadi bahan instruksional agar kegiatan implementasi sesuai dengan rencana penggunaan dana anggaran biaya yang telah disepakati bersama.
4. Partisipasi masyarakat dalam bentuk Swadaya Masyarakat yang berupa tenaga dan material yang dapat menunjang kegiatan adalah bagian dari prasyarat/kewajiban yang harus dipenuhi secara bersama untuk dapat mengikuti program PNPM-PPK.
5. Sistem evaluasi kegiatan yang berupa pembangunan fisik seperti jalan, gedung, dan cara lain terutama diukur dari kualitas hasil kerja dan ketepatan waktu dalam melaksanakan kegiatannya.

Saran-saran.

1. Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa kualitas / kemampuan para pelaku

program sangat menentukan sukses tidaknya Implementasi Program PNPM-PPK dikecamatan Muara Badak, oleh karena itu menjadi sebuah keharusan dalam proses rekrutmen pelaku program perlu diperhatikan tingkat pendidikannya.

2. Perlu memaksimalkan peran serta media cetak maupun elektronik dalam sosialisasi program PNPM-PPK agar dapat lebih dipahami masyarakat secara menyeluruh sehingga masyarakat termotifasi akan manfaat besar dari program PNPM-PPK.
3. Hendaknya Instansi pemerintah dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat Kab. Kutai Kartanegara sebagai leading sektor dan Pemerintahan Kecamatan Muara Badak sebagai penanggung jawab operasional Kegiatan dapat meningkatkan peran sertanya sehingga dapat lebih dini dalam mengantisipasi dampak perubahan sosial masyarakat baik yang negatif maupun positifnya.
4. Pemerintah daerah perlu membrikan dukungan finansial

DAFTAR PUSTAKA

Undang Undang Dasar 1945

Anonim, Undang Undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang Undang RI Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor: 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa.

Surat Mendagri Nomor 414.2/675/PMD, Tentang Pelaksanaan Lokasi dan Alokasi BLM, 2007

Surat Mendagri Nomor : 414.2/979/PMD, tentang Petunjuk Teknis Operasional, 2007.

Onny S. Priyono dan AMW pranaka, 1996 *Pemberdayaan , Konsep, Kebijakan Dan Implementasi* penerbit CSIS jakarta

- Hulme, David & M. Turner (1990) *Sociology of Development, theories, policies and praktikes*. Hertfordshire: Harvester Wheatsheaf
- Dr. Husaini Usman, M.Pd., *Metodologi Penelitian Sosial*. Bumi Aksara, Jakarta, 1995.
- Prof. Dr. S. Nasution, M.A., *Metode Research*. PT Bumi Aksara, Jakarta, 2007.
- Prasetyo, Bambang dan M.J. Ima., *Metode Penelitian Kuantitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Soetomo, *Strategi Strategi Pembangunan Masyarakat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.
- Dr. Usman, Sunyoto, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.
- Dunn William N., *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2000
- Prof. Dr. Sugyono, *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta, Bandung, 2004.
- Abdul Wahab, Solichin. *Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara*. Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
- Islamy M. Irfan. *Prinsip Prinsip Perumusan Kebijaksanaan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004.
- Sunarko. *Publik Policy. Pengertian Pokok untuk memahami dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintahan*. Airlangga University Press, Surabaya 2000.
- Prof. Dr. Sugyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, Bandung, 2007.
- Prof. Dr. Adri Patton, M.Si. *Perilaku dan Pengembangan Organisasi*. Agritek YPN, Malang 2006.
- Dr. Deddy Mulyana, Ma. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rosda, Bandung, 2001.
- Hasibuan, H Melayu. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara, Jakarta 2000.
- Moloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung 1990.
- Nawawi, IL.Hadari. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta 1996.
- Notoatmodjo, Sockidjo. *Pembangunan Sumber Daya Mamusi*. Rineka Cipta, Jakarta, 1992.
- Nasution. S. *Metode Penelitian Kualitatif*. Tarsita, Bandung 1988.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, Bandung 2005
- Jefkins, Frank & Daniel yadin. *Public Relations*. Diterjemahkan oleh Haris Munandar. Erlangga, Jakarta : 2003.